

JOURNAL OF INTEGRATIVE INTERNATIONAL RELATIONS, Vol: 9 No 1 (2024) 1-17
Copyright © Department of International Relations UIN Sunan Ampel Surabaya
ISSN 2477-3557 (Print)
DOI: 10.15642/jiir.2024.9.1.1-17

Kerja Sama Indonesia-Bangladesh dalam Meningkatkan Keamanan Kesehatan Nasional

Marshadea Aisyah

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
E-mail: marshadea21001@mail.unpad.ac.id

Fathiyah Amani Khairunnisa

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
E-mail: fathiyah21002@mail.unpad.ac.id

Bastian Batara Shalom Sirait

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
E-mail: bastian21001@mail.unpad.ac.id

Deasy Silvyia Sari

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
E-mail: deasy.silvyia@unpad.ac.id

Dina Yulianti

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
E-mail: dina.yulianti@unpad.ac.id

Abstract

Cooperation between Indonesia and Bangladesh in the health sector has become a concrete example of a sustainable and mutually beneficial international partnership in strengthening global health resilience. Through the exchange of medical aid, the signing of a Memorandum of Understanding (MoU), the import of pharmaceutical raw materials, and joint training and research programs, both countries have demonstrated their commitment to improving access to health services, strengthening health infrastructure, and facing global health challenges together. This cooperation not only

creates opportunities for mutual learning and exchange of knowledge in dealing with the pandemic and other health issues, but also illustrates the solidarity between nations that is needed in overcoming complex health challenges in the era of globalization.

Kerja sama antara Indonesia dan Bangladesh dalam bidang kesehatan telah menjadi contoh konkret dari kemitraan internasional yang berkelanjutan dan saling menguntungkan dalam memperkuat keamanan kesehatan global. Melalui pertukaran bantuan obat-obatan, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), impor bahan baku farmasi, serta program pelatihan dan penelitian bersama, kedua negara telah menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, memperkuat infrastruktur kesehatan, dan menghadapi tantangan kesehatan global secara bersama-sama. Kerjasama ini tidak hanya menciptakan peluang untuk saling belajar dan bertukar pengetahuan dalam menangani pandemi dan isu kesehatan lainnya, tetapi juga menggambarkan solidaritas antar bangsa yang diperlukan dalam mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks di era globalisasi.

Keywords: Indonesia; Bangladesh; Keamanan Kesehatan; Kerja Sama Internasional

Pendahuluan

Keamanan Kesehatan di Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai sektor yang berkembang secara masif apabila dibandingkan dengan sektor-sektor pilar ketahanan negara lainnya, ataupun sektor yang menjadi urgensi nasional sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari keterikatan hukum Indonesia dengan *International Health Regulation* pada tahun 2007 yang terlambat dibanding negara-negara lainnya. Padahal IHR memiliki kausalitas yang tinggi sebagai instrumen hukum yang dapat mengatur dan memberikan respons efektif yang tepat waktu apabila terdapat wabah, maupun keadaan darurat kesehatan yang berpotensi terjadi antar-negara, untuk meminimalkan dampak kerugian massif yang membahayakan kesehatan masyarakat lintas wilayah geografis dan batas internasional¹.

Kondisi kerugian yang diperoleh secara nasional di berbagai sektor akibat darurat keamanan kesehatan mendorong Indonesia untuk meningkatkan perhatian dan pengelolaan khusus. Hal ini dapat disaksikan dari salah satu langkah Indonesia dalam memperkuat keamanan kesehatan nasional, melalui kebijakan luar negeri yang diimplementasikan dalam kerjasama global. Sejak bergabung dengan IHR pada tahun 2007, Indonesia mulai aktif dalam forum kesehatan global². Termasuk dengan mengikuti *Global Health Security Agenda* sejak tahun 2014, dengan sembilan fokus misi dalam meningkatkan keamanan kesehatan di negara-negara anggota, termasuk penguatan sistem laboratorium nasional, pengembangan sektor tenaga kerja, dan pembahasan mengenai kemudahan regulasi pemerintah nasional untuk kesehatan publik³. Langkah strategis Indonesia lainnya ditandai dengan dipilihnya Indonesia sebagai ketua Steering Group pada tahun 2016⁴. Kementerian Kesehatan Indonesia juga

berhasil menjadi tuan rumah penyelenggara forum *WHO South-East Asia Regulatory Network* (WHO-SEARN), dan berperan penting dalam pembahasan pengawasan terhadap mutu obat internasional, pengembangan standar produk medis hingga perkuatan otoritas regulator obat dan kolaborasi diantaranya.

Jejak Indonesia dalam memulihkan kepentingan keamanan kesehatan nasional melalui kebijakan luar negeri selalu merupakan keputusan yang strategis. Termasuk ketika Indonesia memulai kerjasama secara eksklusif, atau bilateral dengan Bangladesh pada tahun 2011 melalui *Bali Democracy Forum* ke-4 di Nusa Dua Bali. Saat itu salah satu urgensi terbesar dalam penyelenggaraan kerjasama secara bilateral bagi Indonesia adalah sektor kesehatan Bangladesh yang secara umum lebih maju⁵. Selain itu, Presiden SBY melihat kesempatan tersebut sebagai sarana untuk melanggengkan eksistensi Indonesia diantara negara-negara yang sedang mencari posisi dan perlahan memperkuat demokrasi nya. Kerja sama dalam bidang kesehatan akan menambah nilai positif dalam mempererat kerjasama pasukan perdamaian yang telah disepakati. Namun, langkah baru Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada tahun 2022 menjadi pertanyaan baru bagi strategi keamanan kesehatan nasional.

Pada Hari Senin, 18 Juli 2022, Pemerintah Indonesia mengundang perwakilan Bangladesh untuk membahas peluang peningkatan kerjasama salah satunya dalam sektor kesehatan. Usai pertemuan, Retno Marsudi menyampaikan dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Momen, bahwa kesepakatan lebih lanjut yang dibahas penting untuk membangun ketahanan kesehatan kedua negara lebih lanjut demi mengantisipasi potensi pandemi yang akan terjadi di masa depan. Pernyataan pers tersebut juga mengungkapkan fokus selanjutnya dalam kerjasama ini, yakni upaya-upaya peningkatan kesehatan primer dan sekunder, industri vaksin dan farmasi, serta pengembangan teknologi kesehatan⁶. Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah seberapa besar urgensi nasional dalam sektor keamanan kesehatan untuk kesepakatan lebih lanjut dengan Bangladesh, di tengah kepentingan dan prioritas kesehatan negara lainnya.

Saat ini, Indonesia masih memiliki banyak tantangan keamanan kesehatan yang belum terselesaikan, ditambah peluang ancaman pandemi yang dikhawatirkan tiba di masa depan. Keadaan darurat penyakit menular di Indonesia, seperti pandemi Influenza dan SARS-CoV yang berpotensi terjadi di masa depan. Pada pandemi Covid-19, Indonesia dianggap telah mengambil metode efektif secara keseluruhan dalam model penanganan yang telah dikoordinasikan secara nasional oleh Kementerian Kesehatan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan di lapangan dalam lingkup sub- nasional dan pemangku kepentingan terkait belum menggunakan sistem yang memungkinkan akses informasi yang lebih transparan di banyak daerah, sehingga berpengaruh buruk terhadap kekuatan tenaga kesehatan dalam

mengendalikan penyakit⁷. Sistem penanganan pandemi yang terpusat tidak cocok untuk Indonesia karena mengurangi kapasitas layanan daerah dalam merespon pandemi yang cepat⁸.

Indonesia saat ini memerlukan pendekatan inovatif, terutama dalam kebijakan kesehatan masyarakat, serta bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi, memantau dan menangani secara cepat dengan jumlah pasien yang massif. Sistem kapasitas respons kemunculan pandemi, rekrutmen dan pelatihan staf, integrasi dan harmonisasi penanganan penyakit nasional, ketersediaan alat pelindung diri hingga kapasitas jaringan laboratorium dan koordinasi antar-laboratorium adalah beberapa dari urgensi keamanan kesehatan nasional Indonesia saat ini⁹. Indonesia juga memerlukan mobilisasi terstruktur dalam zona regional, tenaga pelatih staf laboratorium hingga relawat masyarakat untuk mengorganisir data penelusuran yang berkaitan dengan kesehatan. Aspek infrastruktur juga tidak luput menjadi urgensi, terutama integrasi infrastruktur dan mobilitas antar-lembaga tingkat nasional dan daerah, yang akan memiliki peran krusial dalam pengawasan peluang pandemi baru¹⁰. Terutama seiring dengan perkembangan transformasi digital di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah memerlukan rekonstruksi pengelolaan untuk mencapai sistem kesehatan yang berkelanjutan¹¹.

Keputusan Retno Marsudi untuk melanjutkan kerja sama eksklusif dengan Bangladesh, serta menambah fokus misi kerjasama menjadi topik pembahasan yang menarik dari aspek pengambilan kebijakan luar negeri. Langkah ini menimbulkan banyak pertanyaan lebih lanjut, terutama mengenai urgensi kerjasama keamanan kesehatan Indonesia-Bangladesh. Penelitian-penelitian sebelumnya secara keseluruhan cenderung mengkaji dan menganalisis dari sudut pandang kebijakan luar negeri hanya terhadap kerjasama Indonesia-Bangladesh yang berada di sektor ekonomi dan keamanan, sehingga meninggalkan banyak ruang untuk pertanyaan dalam langkah strategis Indonesia sejak dulu, hingga saat terakhir ini dengan Bangladesh. Peneliti Bermaksud mencari peluang keuntungan dalam keamanan kesehatan nasional terutama dalam isu-isu kesehatan yang Indonesia hadapi saat ini melalui kebijakan luar negeri yang diambil Menteri Luar Negeri Indonesia. Terutama mengenai peluang pandemi di masa depan yang disebutkan sebelumnya, dan bagaimana hal tersebut dapat diantisipasi melalui kerjasama ini. Peneliti hendak mengkaji kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kerjasama kali ini dengan membandingkannya dengan keputusan-keputusan dalam sektor serupa sebelumnya, termasuk penelaahan lebih lanjut terkait keunggulan sektor kesehatan yang dimiliki Bangladesh hingga Indonesia memilih kerjasama eksklusif pada tahun 2011 dan 2022. Yang paling penting, adalah apakah keputusan luar negeri Indonesia kali ini cukup strategis dalam memajukan keamanan kesehatan nasional.

Kerangka Teori

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh sebuah negara untuk memberikan pengaruh kepada aktor internasional lainnya dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam Bahasa Inggris, kebijakan luar negeri merupakan *foreign policy* yang diambil dari dua kata yaitu *foreign* dan *policy*. *Foreign* merupakan serapan dari bahasa Latin yaitu *foris* yang memiliki arti hubungan dengan negara lain atau pun pihak asing¹². *Policy* sendiri dapat dipahami sebagai kebijakan, pedoman, atau teknik yang dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan¹³. Melalui dua kata tersebut, *foreign policy* dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan, pedoman, atau teknik yang berhubungan dengan negara lain atau pun pihak asing untuk mencapai sebuah tujuan.

Kebijakan luar negeri sering kali dimaknai oleh kebijakan dalam bentuk peraturan secara legal yang diambil oleh sebuah negara. Pada nyatanya, seluruh tindakan atau reaksi terhadap suatu kejadian dengan tujuan tertentu dapat dikategorikan sebagai kebijakan luar negeri. Tindakan ini dapat berupa pernyataan non formal negara, kunjungan, sikap, dan berbagai hal lainnya selama masih berdampak pada pihak di luar teritori wilayah negara tersebut. Secara umum kebijakan luar negeri dilakukan oleh sebuah negara untuk mempertahankan segala sesuatu dalam dunia internasional maupun mengubah segala sesuatu dalam lingkungan internasional.

Perkembangan studi Hubungan Internasional yang pada mulanya memusatkan negara sebagai aktor paling utama membuat kebijakan luar negeri terlihat sebagai sebuah konsep *state-sentris* atau berpusat pada negara. Hal ini dikarenakan aktor internasional yang mampu mengambil tindakan besar yang berpengaruh pada aktor lainnya adalah negara yang dipimpin oleh pemerintah yang berdaulat. Akan tetapi seiring perkembangan studi Hubungan Internasional, aktor independen lainnya dipertimbangkan sebagai aktor yang mampu melakukan kebijakan luar negeri atas dasar aktor tersebut. Organisasi, asosiasi, bahkan seorang individu memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri dan mempengaruhi negara maupun aktor lainnya¹⁴.

Melalui perkembangan tersebut, maka kebijakan luar negeri dilakukan oleh aktor independen seperti negara sebagai subjek yang ditujukan kepada pihak eksternal lainnya baik negara maupun non-negara¹⁵. Sebuah upaya untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak juga dipahami sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Oleh karena itu kebijakan luar negeri merupakan konsep yang sangat mencolok dalam hubungan internasional dan sebagai instrumen komunikasi dalam berinteraksi di lingkungan internasional.

Kebijakan luar negeri dapat berbentuk sikap atau respons aktor internasional terhadap isu tertentu baik secara resmi maupun tidak resmi.

Respons ini kemudian akan bertransformasi menjadi langkah pengambilan sikap yang lebih besar sebelum akhirnya akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan yang didasari oleh aturan hukum lainnya. Berbagai proses, faktor, aktor, dan hal lainnya yang memengaruhi kebijakan luar negeri merupakan bagian dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Sehingga untuk memahami kebijakan yang diambil oleh sebuah negara diperlukan pemahaman atas proses pengambilan kebijakan tersebut.

Berbagai interaksi yang terjadi antara aktor internasional seperti negara dengan negara, negara dengan organisasi, organisasi dengan organisasi, bahkan individu dengan individu dapat menjadi faktor pendukung terbentuknya kebijakan resmi. Oleh karena itu untuk memahami kebijakan luar negeri perlu melihat lebih dalam mengenai sejarah, riwayat kerja sama, bahkan komunikasi yang pernah terjalin. Kebijakan luar negeri tidak bisa dipahami sebagai instrumen yang menjembatani atau hanya sekedar menghubungkan. Berbagai keputusan yang berujung pada penyatuan maupun perpecahan atas berbagai pihak internasional lah yang dapat disebut sebagai kebijakan luar negeri¹⁶.

Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional secara sederhana dimaknai sebagai terjalinnya kerja sama antar aktor internasional di luar batas wilayah untuk mencapai tujuannya sendiri. Akan tetapi, untuk memahami lebih lanjut diperlukan pemahaman mendalam mengenai kerja sama itu sendiri. Kerja sama merupakan hasil dari hubungan yang terjalin dengan syarat memiliki tujuan yang sama melalui interaksi yang dilakukan oleh berbagai aktor. Kesamaan yang dimiliki oleh aktor terkait tidak hanya tujuan, melainkan juga berbagai sumber atau resources yang dimiliki bersama sebagai alat untuk melakukan kerja bersama. Maka kerja sama dapat dilihat sebagai berbagai bentuk dari interaksi sosial antara aktor yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagai sumber atau alat bersama. Kerja sama sering kali dianggap sebagai suatu hal yang harmonis dan positif tetapi kerja sama juga mungkin saja melibatkan kesulitan antar sesama dan dominasi pihak tertentu.

Melalui konsep kerja sama, maka kerja sama internasional merupakan segala usaha yang dilakukan oleh aktor internasional secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sumber milik bersama¹⁷. Kerja sama internasional kemudian akan menjadi sebuah instrumen yang digunakan oleh aktor independen untuk menjalin dan menjaga hubungan antar satu sama lain. Kerja sama internasional antar negara harus terjalin secara rasional baik dalam segi individu maupun kolektif. Rasional dalam segi individual dikarenakan menjadi bagian dari kerja sama merupakan pilihan yang dimiliki oleh setiap aktor. Sedangkan rasional secara kolektif karena setiap perwakilan akan bertemu dan memaksimalkan kerja sama yang terjalin¹⁸.

Secara tradisional, kerja sama internasional dipahami sebagai situasi ketika aktor menyesuaikan perilakunya untuk mengantisipasi atas pihak lain melalui proses koordinasi kebijakan. Melalui perspektif realisme yang berkembang pada masa tradisional, kerja sama hanya dapat dilakukan secara singkat dengan negara yang terbatas dalam bentuk aliansi militer untuk mengatasi, mengintimidasi, maupun mencegah segala bentuk ancaman yang terjadi. Ketika tujuan telah tercapai atau kepentingan negara berubah, maka aliansi akan dibubarkan. Kerja sama juga dipahami sebagai agenda yang disusun dan dilakukan oleh negara dengan kekuatan besar seperti yang dilakukan Amerika Serikat pada pasca perang untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Seiring berkembangnya studi Hubungan Internasional terdapat pendekatan neoliberal institusionalisme yang membantu memahami kerja sama internasional sebagai tindakan yang wajar dilakukan oleh berbagai aktor. Pada perkembangannya saat ini, kerja sama juga tidak hanya terpusat oleh negara sebagai aktor utama. Berbagai aktor independen lainnya seperti IGO, NGO, gerakan sosial transnasional, aktor ekonomi swasta, dan berbagai komunitas lainnya telah menjadi aktor yang berpengaruh dalam menjalin kerja sama dan memberikan dampak baik nasional, regional, bahkan global¹⁹.

Kerja sama internasional terbagi menjadi tiga bentuk yaitu kerja sama multilateral, regional, dan bilateral. Bentuk ini didasari oleh hubungan yang terjalin serta partisipan dari kerja sama tersebut. Kerja sama bilateral adalah bentuk kerja sama yang melibatkan dua negara anggota. Jenis kerja sama bilateral biasanya terjalin lebih intens, memiliki tujuan yang lebih spesifik, akan tetapi berdampak lebih kecil karena biasanya berdampak antar dua negara. Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang terjalin antara lebih dari dua negara. Jenis kerja sama ini berdampak lebih luas karena melibatkan berbagai aktor, dan biasanya dilakukan pertemuan tahunan untuk memastikan komunikasi. Kerja sama multilateral biasanya dinaungi oleh organisasi internasional yang dapat memastikan kerja sama berjalan dengan baik. Berbeda dengan bilateral dan multilateral, kerja sama regional merupakan kerja sama yang dilakukan berdasarkan wilayah yang biasanya didasari oleh kesamaan karakteristik dua negara tersebut.

Keamanan Kesehatan

Keamanan kesehatan dalam bahasa Inggris adalah *health security*, merupakan konsep baru yang masih sering diperdebatkan dalam penggolongannya terhadap ketahanan atau keamanan. Keamanan kesehatan sendiri merupakan konsep turunan dari *human security* atau keamanan manusia yang pertama kali diungkapkan oleh United Nations Development Program (UNDP). Pemahaman keamanan manusia merupakan konsep baru dari paradigm keamanan yang mencakup ancaman seperti kelaparan, penyakit, dan

represi atau penindasan. Keamanan manusia juga berfokus pada perlindungan terhadap gangguan secara tiba-tiba yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari manusia.

Keamanan kesehatan menjadi salah satu subjek yang penting dalam menerapkan keamanan manusia. Secara umum keamanan kesehatan mengkaji dinamika antara hubungan kesehatan dengan tantangan yang ditimbulkan oleh sumber penyakit. Andrew Price-Smith sebagai salah satu peneliti keamanan kesehatan telah mengungkapkan bahwa konseptualisasi mendasar keamanan nasional dan internasional dibutuhkan untuk menunjukkan betapa pentingnya keamanan kesehatan. Berbagai kasus lintas negara yang terdampak penyakit menular memberikan dampak signifikan terhadap keamanan nasional. Andrew juga mengungkapkan penyakit menular dapat memberikan efek domino terhadap ambruknya perekonomian negara, sistem pendidikan, militer, dan bahkan politik.

Pentingnya keamanan kesehatan dalam dunia internasional telah terbukti dengan melihat sejarah berbagai kejayaan internasional yang diruntuhkan oleh penyebaran penyakit menular mematikan. Dengan menanggapi penyakit infeksi menular lebih serius dan mengkategorikannya terhadap ancaman keamanan, maka perhatian aktor internasional dalam menangani penyakit menular juga akan lebih serius²⁰. Pada perkembangannya, ketahanan kesehatan telah berupaya mencapai komitmen global kolektif untuk membangun respons yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya terbatas pada penanggulangan wabah, namun juga pembangunan sistem kesehatan yang lebih kuat. WHO telah menyampaikan dengan tegas bahwa sistem kesehatan berfungsi sebagai landasan ketahanan kesehatan. Oleh karena itu aktor internasional perlu menjalin berbagai mitra pembangunan dan berkomitmen secara finansial dan teknis untuk pembangunan sistem kesehatan yang layak untuk memastikan negara di dunia memiliki ketahanan kesehatan yang kuat²¹.

Ketahanan kesehatan perlu menjadi perhatian seluruh aktor internasional dan upaya kolektif untuk menangani ancaman kesehatan. Berbeda dengan ancaman keamanan tradisional, ketahanan kesehatan dapat dengan mudah meluas dan berujung pada krisis dunia yang membahayakan. Baik negara maju maupun negara berkembang memiliki risiko yang sama-sama tinggi sebagai pihak yang terdampak atas penyakit menular. Oleh karena itu pemastian ketahanan kesehatan serta kerja sama terkait hal ini harus dilakukan seluas-luasnya untuk mencegah krisis dalam dunia internasional.

Metode Penelitian

Peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang disarankan oleh Lamont. Metode kualitatif secara umum merujuk pada strategi

pengumpulan dan analisis data yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data non-numerik. Metode kualitatif digunakan untuk lebih memahami bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Metode penelitian kualitatif cenderung bergantung pada pengamatan induktif, yaitu proses logis yang menghasilkan kesimpulan umum dari pengamatan spesifik terhadap suatu fenomena. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif akan dihasilkan hipotesis yang didapat melalui pengamatan empiris²².

Data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah dokumen asli, yang ditulis oleh individu yang memiliki akses langsung terhadap informasi yang mereka jelaskan, atau secara langsung mengalami peristiwa tertentu. Sumber sekunder adalah sumber yang mengacu pada dan menganalisis sumber primer. Sumber sekunder dapat berupa data pemerintah, artikel jurnal, laporan penelitian, dan buku. Data primer akan diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki informasi atau data yang diperlukan. Sementara itu, data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen-dokumen yang memiliki data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Bangladesh

Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang menjadi dasar dan acuan Indonesia dalam bertindak dan menjalin hubungan dengan negara lain. Prinsip ini juga diterapkan Indonesia dalam mengambil berbagai kebijakan luar negeri. Berbagai keputusan yang dilakukan Indonesia dalam berbagai bentuk seperti sikap, pernyataan resmi, dan hal lainnya juga dapat disebut sebagai kebijakan luar negeri²³. Hubungan kedekatan antara Indonesia dengan negara lain dapat dikategorikan sebagai kebijakan luar negeri yang tentunya dilakukan berdasarkan prinsip politik luar negeri. Oleh karena itu, dalam berhubungan dengan negara lain Indonesia tidak memandang blok maupun pihak sebuah negara karena berprinsip bebas untuk menjalin hubungan dengan negara mana pun dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Penerapan prinsip luar negeri ini dilakukan oleh Indonesia dengan Bangladesh diawali sebagai salah satu negara yang dengan cepat mengakui kemerdekaan Bangladesh pada 25 Februari 1972. Berbagai kebijakan luar negeri telah dilakukan oleh Indonesia bersama Bangladesh terutama dalam bidang perekonomian. Hubungan ini sudah terjalin sejak lama dan melibatkan berbagai bentuk dalam kebijakan luar negeri yang menghasilkan kerja sama dengan Bangladesh. Sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim yang besar, Indonesia juga merupakan negara yang menyetujui keanggotaan Bangladesh di PBB. Hal ini ditunjukkan oleh Indonesia pada 2 Oktober 1972 yang menyatakan dengan kuat dan resmi bahwa Indonesia mengakui kemerdekaan Bangladesh.

Rekognisi Indonesia terhadap Bangladesh telah menjadi langkah awal hubungan baik antara kedua negara ini. Baik secara sikap, pernyataan resmi, dan kebijakan luar negeri, Indonesia telah membuktikan keteguhan atas prinsipnya untuk memerdekakan dunia dari penjajahan. Indonesia dan Bangladesh juga menjaga hubungan dalam berbagai forum internasional seperti OIC, D-8, ASEAN Regional Forum, dan Indian Ocean Association. Atas dasar kedekatan ini, Indonesia juga melakukan perjanjian dagang dengan Bangladesh dengan tujuan mendorong hubungan bilateral antara kedua negara. perjanjian ini tersusun dalam IBTA atau Indonesia Bangladesh Trade Agreement yang diharapkan dapat memberikan kebijakan membangun dalam mengatur tarif perdagangan²⁴.

Penyusunan perjanjian ini merupakan bentuk nyata dari kebijakan luar negeri yang diambil oleh Indonesia atas hubungan dengan Bangladesh. Bangladesh sendiri menilai bahwa terdapat banyak sekali potensi yang dapat digali atas hubungan bilateral dua negara seperti farmasi, agri, barang kulit, energi, mineral, dan berbagai barang dagang lainnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh perwakilan Indonesia yang merasa bahwa perjanjian ini dapat mendorong perdagangan kedua negara. Upaya kerjasama dalam bidang energi, transportasi, infrastruktur, dan pariwisata diharapkan dapat terjalin antara dua negara²⁵.

Pada tahun 2022, Indonesia juga tampak melakukan langkah luar negeri untuk meningkatkan hubungan kerja sama dengan Bangladesh. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abdul Momen membicarakan lebih lanjut mengenai kesepakatan kerja sama antara dua negara. Berdasarkan pertemuan ini, disampaikan bahwa kerja sama yang akan dijalankan bukan hanya di bidang ekonomi saja melainkan juga dibidang kesehatan. Mengingat pada tahun 2022 merupakan masa pemulihan dunia dari Pandemi Covid-19, Menteri Luar Negeri Indonesia mengungkapkan perbincangan antara pihak Bangladesh mengenai pentingnya membangun stabilitas kesehatan untuk mengantisipasi pandemi yang akan datang.

Kesepakatan ini juga ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* atau MoU dengan Bangladesh terkait kerja sama kesehatan. Melalui perjanjian ini Indonesia dan Bangladesh berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang kesehatan, teknologi kesehatan, vaksin, dan industri farmasi²⁶. Kebijakan yang terjalin antara Indonesia dan Bangladesh telah menunjukkan bahwa terjadi proses kebijakan luar negeri baik oleh Indonesia dan Bangladesh. Hal ini dikarenakan kedua negara telah melalui proses Panjang seperti pengambilan sikap, kesepakatan pertemuan, hingga berujung pada penandatanganan dokumen resmi dalam bentuk MoU.

Kerja Sama Indonesia-Bangladesh dalam Bidang Kesehatan

Pada bulan Agustus 2021, Bangladesh telah mengirimkan bantuan obat-obatan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Bantuan obat-obatan tersebut terdiri dari 1.000 kotak vitamin D (DGain), 600 kotak Favipiravir, 3.000 kotak Zinc Imuzin, 800 kotak Azitromisin, dan 3.000 botol Ramdesivir (Ninavir). Pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Bangladesh atas bantuan tersebut. Duta Besar Bangladesh menekankan pentingnya kedua negara untuk saling membantu dan bekerja sama di masa-masa sulit, dan berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi penanganan COVID-19 di Indonesia. Bangladesh merupakan mitra dagang terbesar ke-3 Indonesia di Asia Selatan, setelah India dan Pakistan, dan merupakan pasar potensial bagi industri strategis Indonesia. Kedua negara terus mengembangkan kerja sama di berbagai bidang, baik melalui forum bilateral, regional, maupun multilateral²⁷.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan mitranya dari Bangladesh, Dr Abul Kalam Abdul Momen, pada bulan Juli 2022 membahas pentingnya membangun ketahanan kesehatan untuk mengantisipasi pandemi di masa depan. Melalui Mou ini, kedua negara akan meningkatkan kerja sama di bidang pelayanan kesehatan primer dan sekunder, teknologi kesehatan, vaksin, dan industri farmasi²⁸.

Pada bulan September 2023 kedua negara bersepakat untuk bekerja sama di sektor energi, pertanian dan kesehatan saat Presiden Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, mengadakan pertemuan bilateral dengan mitranya dari Indonesia, Joko Widodo, di sela-sela KTT ASEAN di Indonesia. Mohammed Shahabuddin mengatakan bahwa Indonesia dapat mengimpor produk farmasi berstandar internasional, keramik dan barang-barang Readymade Garments (RMG) dari Bangladesh. Ia juga mengundang para investor Indonesia untuk menanamkan modal di Bangladesh karena konsistensi iklim investasi yang ramah selama satu dekade terakhir. Mohammad Shahabuddin mencatat bahwa Bangladesh sedang menyiapkan sebanyak 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 39 Taman Teknologi Tinggi dan Kawasan Ekonomi khusus lainnya di negara tersebut. Ia mengatakan, "Jika Indonesia tertarik, Bangladesh akan dengan senang hati menyediakan tempat di zona ekonomi untuk Indonesia".

Presiden Bangladesh menekankan kolaborasi yang lebih besar antara sektor swasta kedua negara untuk memanfaatkan peluang investasi. Ia mendorong para investor dan komunitas bisnis Indonesia untuk memanfaatkan peluang besar yang ada di Bangladesh demi keuntungan bersama kedua negara. Ia juga menyatakan bahwa konektivitas udara langsung antara Dhaka dan Jakarta atau Bali akan segera dibangun dan peluang akan diciptakan untuk meluncurkan pengiriman antara pelabuhan laut kedua negara. Ia mengatakan bahwa Bangladesh sangat menghargai hubungannya dengan Indonesia karena

Indonesia merupakan salah satu negara Muslim pertama yang mengakui Bangladesh pada masa kepemimpinan Bapak Bangsa Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman²⁹.

Menteri Luar Negeri Bangladesh, Dr AK Abdul Momen, dan Menteri Kesehatan Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, kemudian menandatangani MoU atas nama pemerintah masing-masing. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama melalui pelatihan, program pertukaran, penelitian bersama, dan transfer teknologi. "Penandatanganan MoU kerja sama kesehatan ini merupakan contoh lain bagaimana kedua negara dapat memperoleh manfaat maksimal dari hubungan bilateral kita yang sangat baik," kata Momen. Kedua menteri berharap bahwa implementasi yang tepat dari pengaturan ini akan meningkatkan komunikasi antar masyarakat di antara kedua negara yang bersahabat ini. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas berbagai isu bilateral seperti kesehatan dan ketahanan pangan.

Sadikin mengucapkan selamat kepada Bangladesh atas keberhasilannya yang luar biasa dalam mengelola krisis Covid-19 dan melanjutkan momentum pertumbuhan. Momen menyatakan bahwa pendidikan kedokteran Bangladesh adalah pilihan yang tepat bagi banyak siswa dari negara-negara tetangga dan sekitarnya, Momen meminta menteri kesehatan Indonesia untuk saling mengakui sertifikasi akademik dan profesional untuk kepentingan kedua negara. Momen juga meminta pihak Indonesia untuk mengimpor produk farmasi dan bahan baku dari Bangladesh. Mengingat ketidakseimbangan yang ada dalam volume perdagangan bilateral dan menyoroti bahwa produk farmasi Bangladesh berkelas dunia dan diekspor ke lebih dari 150 negara. Momen meminta untuk dipermudah proses registrasi produk farmasi Bangladesh di Indonesia. Kedua menteri menyatakan kepuasan mereka dengan tradisi panjang kerja sama yang kuat antara kedua negara di forum regional dan internasional, dan berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam isu-isu yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama³⁰.

Bantuan Ketahanan Kesehatan Bangladesh untuk Indonesia

Isu ketahanan kesehatan telah menjadi salah satu prioritas nasional, terutama sejak saat seluruh negeri menghadapi krisis pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan lekas membentuk strategi, serta visi misi ketahanan kesehatan Indonesia dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan, dengan fokus utama yakni transformasi sistem kesehatan, dengan landasan utama dari *Health Emergency Risk Management in WHO – SEA Region 2014- 2023*. Target yang ambisius ini tidak hanya melibatkan pemerintah, namun juga pihak swasta serta organisasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya implementasi keseluruhan sehingga perubahan mampu terjadi sepenuhnya dan rampung pada tahun 2024, sesuai dengan target.

Agenda transformasi kesehatan untuk peningkatan ketahanan kesehatan nasional ini memiliki keenam pilar yang menjadi fokus; transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Berdasarkan rujukan tersebut, kerjasama ketahanan kesehatan antara Indonesia dengan Bangladesh yang telah diresmikan jelas memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan kesehatan nasional Indonesia secara bertahap, terutama terhadap pilar pertama yang menjadi acuan utama dalam target nasional yang telah dibuat. Langkah awal ini diekspektasikan akan berkembang, dengan bantuan ketahanan kesehatan lainnya di masa yang akan datang.

Sebelum pembaharuan kerjasama, Bangladesh telah menunjukkan signifikansi nya dalam isu ini, dengan mengirimkan obat-obatan untuk menangani pandemi COVID-19 untuk Indonesia, termasuk 1000 boks Vitamin D, 3000 boks Imuzin Zinc, 600 boks Favipiravir, 3000 botol Ramdesivir, serta 800 boks Azythromycin dalam gelombang bantuan tahap satu. Pemberian bantuan ini diasumsikan menjadi salah satu motivasi Indonesia dalam mempererat hubungan diplomatiknya dengan Bangladesh, terutama dalam bidang ketahanan kesehatan. Sebab kontribusi Bangladesh saat itu dinilai memiliki peluang yang berharga dalam memenuhi pilar pertama transformasi kesehatan nasional, yakni transformasi layanan primer dalam memperkuat pemenuhan obat-obatan dan alat kesehatan. Inisiasi pertolongan Bangladesh membuka membuka peluang perluasan aspek- aspek dalam kerjasama ketahanan kesehatan Indonesia dengan negara tersebut.

Pada 9 September 2023, Indonesia secara resmi memulai pelatihan kesehatan bersama delegasi dari dua negara, salah satunya adalah Bangladesh, dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga melalui sistem keluarga berencana dan materi mengenai reproduksi. Secara umum, telah diketahui bahwa Indonesia telah bergelut dalam waktu yang cukup lama untuk menangani dan mengendalikan isu populasi dalam negeri yang terus bertambah, terutama dengan situasi kesehatan yang jauh dari kata ideal bagi masyarakat. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan jawaban solutif dan implementatif agar target transformasi ketahanan kesehatan nasional dapat terpenuhi secara utuh.

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani kesepakatan dengan Bangladesh terkait impor bahan baku produk farmasi dari Bangladesh di tengah-tengah agenda KTT Asia Timur ke-18 yang diadakan di Jakarta. Dalam hal ini Indonesia memperhatikan fakta bahwa bahan baku industri farmasi dari Bangladesh memiliki kelas dunia dan telah diekspor ke lebih dari 150 negara. Tentunya dengan kesepakatan terbaru, proses registrasi produk farmasi dari Bangladesh di Indonesia akan sangat dipermudah, terutama dengan semakin banyaknya bahan baku farmasi yang akan diimpor. Langkah ini juga dinilai akan

membantu proses revitalisasi kesehatan di masyarakat, melalui kenaikan jumlah obat-obatan dan alat kesehatan.

Kesepakatan kerjasama tidak berhenti pada titik tersebut, karena poin-poin utama lainnya dalam MoU menunjukkan kerjasama lebih lanjut kedua negara dalam bidang ketahanan kesehatan, terutama dalam pembiayaan kesehatan, pelatihan, program pertukaran tenaga kerja kesehatan, penelitian lebih lanjut dalam rangka menangani potensi pandemi di masa depan, hingga berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan masing-masing negara. Keberhasilan Bangladesh dalam melakukan transformasi di salah satu aspek ketahanan kesehatannya dengan menciptakan model klinik Sheikh Hasina, hingga perguruan tinggi kedokteran Bangladesh yang menjadi pilihan utama dalam menempuh pendidikan bagi negara-negara tetangganya, menambah motivasi serta peluang nyata bagi Indonesia untuk meningkatkan keamanan kesehatan nasional melalui kerjasama ini.

Kesimpulan

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Bangladesh merupakan hubungan kerja sama yang dimulai sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Melalui berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, sosial, keamanan, kesehatan, dan sektor lainnya Indonesia dan Bangladesh saling membantu dan menjaga hubungan yang sudah tercipta. Pada pandemi Covid-19, Indonesia dan Bangladesh juga menjadikan momen ini untuk menjalin kerja sama bidang kesehatan yang berhasil membawa dampak signifikan untuk kedua negara. Bangladesh telah memberikan berbagai bantuan obat-obatan untuk Indonesia begitu juga Indonesia yang memberikan bantuan kesehatan untuk Bangladesh. Hal ini membuktikan keeratatan hubungan dan solidaritas yang terjalin melalui kerja sama antara kedua negara untuk menghadapi tantangan global tersebut.

Hubungan yang terjalin melalui kerja sama kesehatan juga menjadi landasan untuk memperkuat hubungan diplomatik kedua negara serta komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan kesehatan dalam masa pandemi Covid-19. Berbagai langkah konkret seperti penandatanganan MoU antar kedua negara, pertukaran tenaga kerja kesehatan, serta kolaborasi dalam pengembangan penelitian, Indonesia dan Bangladesh menunjukkan komitmen dalam memperkuat infrastruktur kesehatan serta meningkatkan akses layanan dan fasilitas bagi masyarakat dua negara.

Indonesia dan Bangladesh juga menjalin kerja sama impor bahan baku farmasi dari Bangladesh, yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas akses terhadap produk farmasi yang berkualitas internasional. Hal ini tidak hanya mendukung industri farmasi kedua negara, tetapi juga membuka peluang dalam meningkatkan ketersediaan obat-obatan dalam sistem

kesehatan nasional. Selain kerja sama impor obat-obatan, upaya penguatan ketahanan kesehatan juga diikuti dengan pelatihan kesehatan bersama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan primer. Langkah-langkah ini merupakan bukti nyata dari upaya kedua negara untuk transformasi sistem kesehatan baik di Indonesia mau pun di Bangladesh.

Kerja sama yang terjalin juga menciptakan peluang bagi kedua negara dalam berbagi pengetahuan dan teknologi dalam menanggulangi potensi pandemi di masa depan. Berbagai inovasi dan pengalaman yang telah dilakukan oleh masing-masing negara juga dipelajari satu sama lain sebagai upaya penguatan ketahanan kesehatan. Dengan begini, kedua negara dapat memperkuat posisi dalam arena kesehatan internasional dan memberikan kontribusi dalam menjaga kesejahteraan masyarakat global. Komitmen jangka panjang Indonesia dan Bangladesh juga memperkuat sistem kesehatan kedua negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerja sama ini menjadi contoh negara-negara lain dalam menjalin kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan dalam memperkuat ketahanan kesehatan global.

Endnotes

¹ WHO, 2008, 2017

² Kemenkes RI, 2011

³ CDCP, 2014

⁴ WHO, 2016

⁵ Teuku Faizasyah, 2011

⁶ Kemlu, 2022

⁷ Crooks, 2020

⁸ Banatvala, 2020

⁹ Rasmussen, 2020

¹⁰ Buckee, 2020

¹¹ Bhattacharya, 2020

¹² Heywood, 2011

¹³ Howlett, 2010

¹⁴ Hill, 2003

¹⁵ Dugis 2021

¹⁶ Leira, 2019

¹⁷ Siitonen, 1990

¹⁸ Barrett, 1999

¹⁹ O'Neill et al., 2004

²⁰ Youde, 2005

²¹ Aldis, 2008

²² Lamont, 2015

²³ Leira, 2019

²⁴ Ruhullah & Mutiarin, 2021

²⁵ Dhaka Tribune, 2020

²⁶ Antara, 2022

²⁷ Indonesia Window, 2021

²⁸ Anggoro, 2022

²⁹ Daily Sun, 2023

³⁰ Dhaka Tribute, 2023

References

Anggoro, W. D. (2022, July 18). Indonesia committed to enhancing health cooperation with Bangladesh. medcom.id. <https://www.medcom.id/english/world/MkMP3nRb-indonesia-committed-to-enhancing-health-cooperation-with-bangladesh>

Barrett, S. (1999). A Theory of Full International Cooperation. *Journal of Theoretical Politics*, 11(4), 519–541. <https://doi.org/10.1177/0951692899011004004>

Daily Sun. (2023, September 7). Bangladesh, Indonesia agree to work together in energy, health sectors. daily-sun. <https://www.daily-sun.com/printversion/details/710840>

Dhaka Tribute. (2023, September 5). Dhaka, Jakarta sign MoU on health cooperation. <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/foreign-affairs/324499/dhaka-jakarta-sign-mou-on-health-cooperation>

Dugis, V. (2021). Explaining Foreign Policy Change. *JURNAL MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK*, 2, 101–104.

Heywood, A. (2011). *Global Politics*. palgrave macmillan.

Hill, C. (2003). *The changing politics of foreign policy*. Palgrave Macmillan.

Howlett, M. (2010). *Designing Public Policies*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203838631>

Indonesia Window. (2021, August 8). COVID-19 – Bangladesh sends medical aid to Indonesia. <https://indonesiawindow.com/en/covid-19-bangladesh-sends-medical-aid-to-indonesia/>

- Leira, H. (2019). The Emergence of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 63(1), 187–198. <https://doi.org/10.1093/isq/sqy049>
- O'Neill, K., Balsiger, J., & VanDeveer, S. D. (2004). ACTORS, NORMS, AND IMPACT: Recent International Cooperation Theory and the Influence of the Agent-Structure Debate. *Annual Review of Political Science*, 7(1), 149–175. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.7.090803.161821>
- Siitonen, L. (1990). Political Theories of Development Cooperation - A Study of Theories of International Cooperation. In *Political Theories of Development Cooperation - A Study of Theories of International Cooperation* (Vol. 1990, Issue 086). UNU-WIDER.
- Youde, J. (2005). Enter the Fourth Horseman: Health Security and International Relations Theory. *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, 6. Aldis, W. (2008). Health security as a public health concept: a critical analysis. *Health Policy and Planning*, 23(6), 369–375. <https://doi.org/10.1093/heapol/czn030>